



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN ANGGARAN 2024



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)**

**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-NYA sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah akhir Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini, merupakan pencapaian penyelenggaraan pemerintah fungsi penunjang perencanaan penelitian dan pengembangan,

Akhirnya Kami berharap, laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik di masa datang dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKPJ Tahun 2024 ini, Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita semua agar selalu ikhlas dan amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat yang diberikan guna terwujudnya cita-cita masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 23 Januari 2024
KEPALA BAPPELITBANGDA



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19840104 200903 2 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB.I. Pendahuluan	1
1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural	9
BAB.II. Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	11
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	11
2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	13
2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	41
2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan.....	42
2.1.4. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.....	43
2.1.5. Inovasi.....	66
2.1.6. Prestasi / Penghargaan.....	67
2.2. Kebijakan daerah.....	67
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023	68
BAB.III. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan dan Penugasan	69
2.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan yang dilaksanakan	69
2.2. Hambatan – Hambatan	69
BAB.IV. Penutup	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Tahun 2024 9

Tabel 1.2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan / Ruang
Tahun 2024..... 10

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Tahun 2024..... 10

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan
Program dan Kegiatan 12

Tabel 2.2. Capaian IKU Bappelitbangda Kepulauan Selayar
Tahun 2024..... 42

Tabel 2.3. Capaian Kinerja Bappelitbangda Kepulauan Selayar
Tahun 2024..... 43

Tabel 2.4. Matriks Program Prioritas Daerah yang mendukung
Prioritas Nasional Tahun 2024 44

Tabel 2.5. Croscutting Sasaran Program 45

Tabel 2.6. Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah dengan
Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024.... 50

Tabel 2.7. Analsis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target
Kinerja Program yang sudah ditetapkan 65

Tabel 2.8. Kebijakan Daerah yang ditetapkan tahun 2024 68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappelitbangda Kepulauan
Selayar 3

Gambar 2.1. Tampilan Website selayar.emonev 66

BAB I

PENDAHULUAN

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat hasil penyelenggaraan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

1.1. Gambaran Umum OPD

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, disebutkan

bahwa Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Organisasi Perangkat Daerah bertipe A yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, dimana, salah satunya adalah melakukan perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Perumusan rencana strategis tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, beralamat di jalan Jend. Achmad Yani No. 1 Benteng, Kode Pos 92812, website : <https://bappelitbangda.kepulauanselayarkab.go.id/> Email : kepeg.bappedasly@gmail.com dengan titik koordinat X -6,120087 dan Y 120.466638.

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, disebutkan bahwa Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappelitbangda mempunyai fungsi:

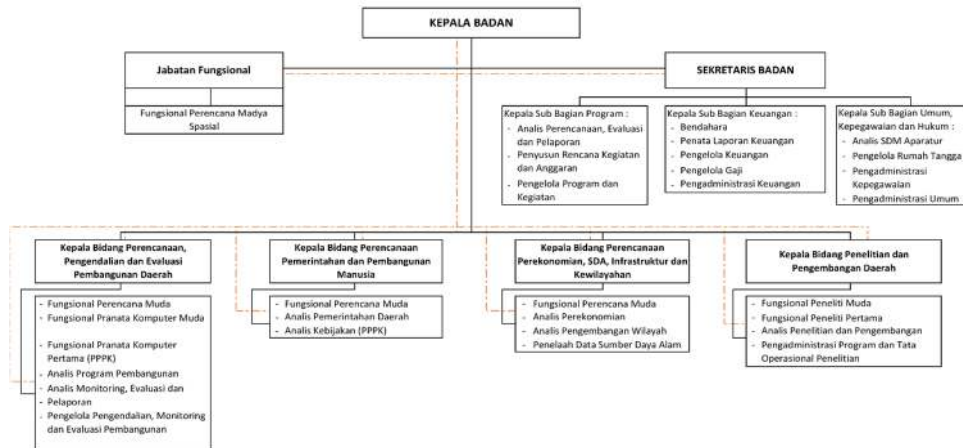
- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, terdiri atas:
4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
5. Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas:
7. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Perencana Ahli; dan
 - b. Peneliti Ahli.

Struktur organisasi Bappelitbangda digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappelitbangda Kep Selayar



Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No 4 Tahun 2022

Uraian tugas dan fungsi Kepala Bappelitbangda, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan Sub Bidang sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati pimpinan terkait tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan teknis maupun administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan;
- b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan dan kebersihan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional lingkup Badan;
- e. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Badan;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- h. pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Badan;
- i. penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur lingkup Badan;
- j. penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi lingkup Badan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

- a. Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja;
- b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan;
- c. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan melaksanakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan, pengendalian dan pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- (5) Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan daerah;

- f. Pelaksanaan administrasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah; dan
 - g. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.
- (7) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Berdasarkan data kepegawaian Bappelitbangda Kepulauan Selayar per Desember 2024, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 31 pegawai. Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 30 pegawai, Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Bappelitbangda Kepulauan Selayar adalah sebanyak 63 pegawai.

Jumlah dan komposisi pegawai ASN dan Non ASN pada Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel. I.1.
 Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan
 Jenjang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Non ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai
	Perguruan Tinggi	27	87,10%	44,26%	23	76,67%	37,70%
1	S3	2	6,45%	3,28%			
2	S2	12	38,71%	19,67%			
3	S1	13	41,94%	21,31%	22	73,33%	36,07%
4	D3	0	0,00%	0,00%	1		

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Non ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai
	Bukan Perguruan Tinggi	4	12,90%	6,56%	7	23,33%	11,48%
1	SMA	4	12,90%	6,56%	7	23,33%	11,48%
Jumlah		31			30		
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN dan Non ASN)		61					

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2024

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 30 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 10 pegawai (32%), golongan III sebanyak 19 pegawai (61%), dan golongan II sebanyak 2 pegawai (6%), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel. I.2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2024

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1.	Golongan IV	10	32%
	IV/c	1	3%
	IV/a	9	29%
2.	Golongan III	19	61%
	III / d	8	26%
	III / c	4	13%
	III / b	4	13%
	III / a	3	10%
3.	Golongan II	2	6%
	II / d	0	0%
	II / c	2	6%
	II / b	0	0%
Jumlah		31	100%

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2024

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 30 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (3.23%) yang menduduki eselon II, 5 pegawai (16,13%) yang menduduki eselon III, 3 pegawai (9,68%) yang menduduki eselon IV, 11 pegawai (35.48%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 11 pegawai (35.48%) yang termasuk dalam jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel. I.3. Jumlah, Pegawai ASN
yang Menduduki Jabatan Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Eselon II	1	3,23%
2	Eselon III	5	16,13%
3	Eselon IV	3	9,68%
4	Jabatan Fungsional Tertentu	11	35,48%
5	Jabatan Fungsional Umum	11	35,48%
Jumlah		30	100%

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2024

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada tahun anggaran 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan 4 (Empat) Program yaitu 1) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terurai dalam 8 (delapan) kegiatan penunjang, 6 (enam) kegiatan bidang urusan perencanaan serta 3 (tiga) kegiatan bidang urusan penelitian dan pengembangan.

Capaian kinerja berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan mencapai 100% dengan realisasi keuangan 96,40% atau Rp.6.042.973.559 (Enam Miliar Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dari total pagu Rp.6.268.178.000 (Enam Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), beberapa kegiatan merupakan amanah RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, capaian kinerja sebagaimana tersebut, disajikan pada tabel 2.1 :

Tabel. 2.1

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Penunjang Pemerintahan	Bappelitbangda	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
					4.387.750.900	4.252.274.955			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
					15.000.000	12.638.100			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen			
					2.000.000	1.898.400			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					1.500.000	1.138.400			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					1.500.000	1.142.800			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					1.500.000	1.140.600			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					1.500.000	1.026.300			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen			
					4.000.000	3.475.600			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan			
					3.000.000	2.816.000			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
					2.918.850.283	2.904.497.658			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	30 Orang			
					3.256.102.600	3.173.874.965			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Laporan	24 Laporan			
					12.000.000	9.939.500			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan			
					5.000.000	4.074.500			
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Laporan	2 Laporan			
					3.000.000	2.315.600			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	100%			
					7.559.900	7.194.900			
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Brang Milik Daerah Pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan			
					3.469.400	3.405.900			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					4.090.500	3.789.000			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0%			
					10.000.000	3.875.000			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 ASN	4 ASN	Anggaran di pangkas, target tidak tercapai		
					10.000.000	3.875.000			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
					559.749.500	557.331.271			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Laporan	12 Laporan			
					20.437.500	20.437.300			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Paket	12 Paket			
					12.120.000	11.320.000			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Kali	133 Kali			
					472.592.000	472.533.971			
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Laporan	1 laporan			
					54.600.000	53.040.000			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1000%			
					59.775.200	57.800.000			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit	0 Unit	Anggaran di pangkas, Target tidak tercapai		
					0	0			
				Pengadaan Mebel	0 Unit	0 Unit	Anggaran di pangkas, Target tidak tercapai		
					0	0			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	2 Unit			
					55.113.900	53.200.000			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit			
					4.661.300	4.600.000			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
					270.493.700	241.753.744			
				Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan			
					27.872.000	26.888.144			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan			
					242.621.700	214.865.600			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
					189.070.000	181.477.375			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	17 Unit	17 Unit			
					140.500.000	135.395.955			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Dinas Operasional atau Lapangan					
				Pemeliharaan Mebel	3 Unit 2.480.000	3 Unit 2.445.900			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit 6.410.000	12 Unit 6.275.000			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit 21.920.000	1 Unit 21.915.800			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14 Unit 9.760.000	14 Unit 7.506.000			
2	Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Perencanaan	Bappelitbangda		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	90% 969.898.700	100% 911.448.329			
			RPJMD 2021-2026	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	90% 694.444.500	100% 656.169.129			
				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	2 Dokumen 41.316.000	2 Dokumen 38.923.200			
				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	2 Dokumen 90.849.800	2 Dokumen 83.386.577			
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	2 Berita Acara 13.996.700	2 Berita Acara 13.128.600			
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara 65.455.000	1 Berita Acara 61.555.400			
				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	440 Usulan 48.480.000	440 Usulan 47.751.400			
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen 434.347.000	2 Dokumen 411.423.952			
			Inspektorat Propinsi	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100% 44.014.000	100% 41.234.500			
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	68 Dokumen 15.560.500	68 Dokumen 14.218.700			
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	26 OPD 10.822.500	26 OPD 9.812.800			
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Buku 17.631.000	1 Buku 17.203.000			
			RPJMD 2021-2026	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100% 231.440.200	100% 214.044.700			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2 Laporan 19.897.200	2 Laporan 14.650.800			
				Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1 Laporan 0	1 Laporan 0	Anggaran di pangkas, Target tidak tercapai		
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan 211.543.000	4 Laporan 199.393.900			
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	85% 560.528.400	100% 534.837.600			
		RPJMD 2021-2026		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	90% 343.692.000	100% 327.640.700			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen 15.285.600	11 Dokumen 13.310.200			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 OPD 10.244.700	11 OPD 9.475.200			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 laporan 15.686.400	11 laporan 14.619.500			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan 37.212.800	1 Laporan 35.783.600			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen 33.412.200	5 Dokumen 31.615.100			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 OPD 8.501.400	5 Dokumen 7.904.600			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan 134.754.500	1 Laporan 133.692.100			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan 88.594.400	1 Laporan 81.240.400			
		RPJMD 2021-2026		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85% 65.435.400	100% 60.504.700			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan	14.134.100	13.689.700			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	3 OPD	3 OPD			
				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6.279.700	6.187.300			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	1 Laporan	1 Laporan			
				Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.350.000	2.874.600			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	0 Laporan	0 Laporan			
				Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Perekonomian	0	0			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28.614.300	27.916.000			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	3 OPD	3 OPD			
				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.348.300	2.966.900			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	1 Laporan	1 Laporan			
				Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7.709.000	6.870.200			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	0 Laporan	0 Laporan			
				Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	0	0			
			RPJMD 2021-2026	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85%	100%			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	151.401.000	146.692.200			
				Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	50.027.300	49.848.000			
				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 OPD	3 OPD			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	3.886.400	2.259.600			
				Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	58.596.900	58.156.000			
				Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	10.784.900	10.252.400			
				Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan	11 Dokumen	11 Dokumen			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	19.373.400	19.000.800			
					11 OPD	11 OPD			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
3	Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Penelitian dan Pengembangan	Bappelitabngda		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3.457.100	2.802.800			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3.529.300	3.078.800			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1.745.700	1.293.800			
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	100%			
					350.000.000	344.412.675			
				Kegiatan Penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian dan Peraturan	100%	100%			
					241.010.000	239.920.775			
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
					73.010.000	72.520.875			
			RPJMD 2021-2026	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen			
					168.000.000	167.399.900			
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	100%			
					57.993.000	54.975.500			
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen			
					57.993.000	54.975.500			
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	-	Anggaran di pangkas, Target tidak tercapai		
					-	-			
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan usaha Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Anggaran di pangkas, Target tidak tercapai		
					-	-			
				Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	50%	50%			
					50.997.000	49.516.400			
				Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Anggaran di pangkas, Target tidak tercapai		
					-	-			
				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1 Dokumen	1 Dokumen			
					50.997.000	49.516.400			

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, indikator capaian kinerja kegiatan adalah Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dengan Target kinerja Renstra Tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Bappelitbangda yang tersusun dengan jumlah anggaran Rp. 2.000.000,- terealisasi sebesar Rp.1.898.400,- dan hasilnya adalah 3 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, diantaranya Dokumen Renja Bappelitbangda Tahun 2025, Dokumen Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2024, dan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Bappelitbangda 2021-2026;

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan jumlah anggaran Rp.1.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.138.400 dan hasilnya Dokumen RKA Bappelitbangda Tahun 2025;

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- dengan jumlah anggaran Rp.1.500.000, terealisasi sebesar Rp.1.142.800,- dan hasilnya adalah Dokumen Perubahan RKA Bappelitbangda tahun 2024;
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan dengan jumlah anggaran Rp.1.500.000,- terealisasi sebesar Rp.1.140.600,- dan hasilnya adalah Dokumen DPA Bappelitbangda Tahun 2024;
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan jumlah anggaran Rp.1.500.000, terealisasi sebesar Rp.1.026.300,- dan hasilnya adalah Dokumen Perubahan DPA Bappelitbangda Tahun 2024;
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah anggaran Rp.4.000.000,- terealisasi sebesar Rp.3.475.600,- dan hasilnya adalah 3 Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, diantaranya Laporan Akuntabilitas Pemerintahan (Lakip) Bappelitbangda Tahun 2023, Laporan LKPJ Bappelitbangda Tahun 2023, dan Laporan LPPD Bappelitbangda Tahun 2023;

g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp.3.000.000, terealisasi sebesar Rp.2.816.000,- dan hasilnya adalah Laporan Evaluasi kinerja Per Triwulan Bappelitbangda Tahun 2024.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Indikator capaian kinerja Kegiatan adalah Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dengan Target kinerja Renstra Tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan dengan jumlah anggaran Rp.3.256.102.600, terealisasi sebesar Rp.3.173.874.965, dan keluarannya 31 Orang ASN terbayarkan gaji dan tunjangannya hingga 14 kali;

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan jumlah anggaran Rp.12.000.000, terealisasi sebesar Rp.9.939.500, dan keluarannya 24 Laporan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan Bappelitbangda;

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan jumlah anggaran

Rp.5.000.000, terealisasi sebesar Rp.4.074.500, dan keluarannya Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran;

- d. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan tanggapan Pemeriksaan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan dengan dengan jumlah anggaran Rp.3.000.000, terealisasi sebesar Rp.2.315.600, dan keluarannya Dokumen tanggapan hasil pemeriksaan keuangan Bappelitbangda oleh ITDA dan BPKP.

- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu dengan Target kinerja Renstra Tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu:

- a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD dengan jumlah anggaran Rp.3.469.400, terealisasi sebesar Rp.3.405.900, dan keluarannya Laporan Asset Bappelitbangda Per Triwulan Tahun 2024;

- b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD dengan jumlah anggaran Rp. 4.090.500, terealisasi sebesar Rp.3.789.000, dan keluarannya Laporan rekonsiliasi asset Bappelitbangda Per Semester Tahun 2024.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Aparatur yang ditingkatkan Kualitas dan Kapabilitas Aparatur dengan Target kinerja Renstra Tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Fasilitasi Pelaksanaan Diklat Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan jumlah anggaran Rp.10.000.000, terealisasi sebesar Rp.3.875.000, dan keluarannya sebanyak 3 ASN mengikuti Pelatihan Tekhnis;

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Target kinerja Renstra Tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dengan jumlah anggaran Rp. 20.437.500, terealisasi sebesar Rp.20.437.300, dan keluarannya 12 Paket;

b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Indikator capaian kinerja adalah Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan dengan jumlah anggaran Rp. 12.120.000, terealisasi

sebesar Rp.11.320.000, dan keluarannya 4 koran/bahan bacaan;

- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan jumlah anggaran Rp.472.592.000, terealisasi sebesar Rp.472.533.971, dan keluarannya 133 Laporan Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah.

- d. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan jumlah anggaran Rp.54.000.000, terealisasi sebesar Rp.53.040.000 dan keluarannya Laporan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik.

- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator capaian kinerja Kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Target kinerja Renstra Tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan jumlah anggaran Rp.55.113.900, terealisasi sebesar Rp.53.200.000, dan keluarannya tersedianya Peralatan Personal Computer berupa Laptop sebanyak 2 (dua) Unit dan Printer sebanyak 3 (tiga) unit.

- b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan jumlah anggaran Rp.4.661.300, terealisasi sebesar Rp.4.600.000, dan keluarannya tersedianya TV peralatan Zoom Meeting sebanyak 1 Unit.

- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator capaian kinerja Kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Target kinerja Renstra Tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan jumlah anggaran Rp.27.872.000, terealisasi sebesar Rp.26.888.144, dan keluarannya tersedianya jaringan internet dan sumber daya air PAM;

- b. Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan jumlah anggaran Rp.242.621.700, terealisasi sebesar Rp.214.865.600, dan keluarannya tersedianya honorarium PTT, Honorarium Supir dan Honorarium Petugas Kebersihan, Pembayaran BPJS Tenagakerja dan penyediaan ATK.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dengan Target kinerja Renstra Tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan jumlah anggaran Rp.140.500.000, terealisasi sebesar Rp.135.395.955, dan keluarannya 36 Unit yang terbayarkan Pajak dan 17 Unit yang terpelihara;

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.

Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Mebel yang dipelihara dengan jumlah anggaran Rp.2.480.000, terealisasi sebesar Rp.2.445.900, dan keluarannya 3 Unit Mebel yang di perbaiki;

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan Target 100% dengan jumlah anggaran Rp.6.410.000, terealisasi sebesar Rp.6.275.000, dan keluarannya 10 Unit peralatan kantor yang dipelihara, seperti laptop, dan 6 Unit printer yang dipelihara;

- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah jumlah asset tak berwujud (website) yang dipelihara dengan jumlah anggaran Rp.8.000.000, terealisasi sebesar

- Rp.7.938.720, dan keluaran tersedianya biaya perpanjangan biaya hosting website Bappelitbangda.
- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah luas gedung kantor yang dipelihara dengan jumlah anggaran Rp.21.920.000, terealisasi sebesar Rp.21.915.800, dengan keluaran tersedianya ruang PPID Bappelitbangda;
- f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi dengan jumlah anggaran Rp.9.760.000, terealisasi sebesar Rp.7.506.000, dan keluarannya 25 Unit sarana prasarana Gedung kantor yang dirawat, seperti pendingin ruangan, televisi, kulkas dan lainnya.

➤ **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, indikator capaian kegiatan adalah Persentase Kesesuaian Perencanaan dan Pendanaan Dengan Dokumen Pelaksanaan Pembangunan dengan Target kinerja Renstra Tahun 2024 sebesar 90% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :
- a. Sub. Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategi Pembangunan Daerah.
- Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Rancangan Awal (Teknokratik) RKPD/RPJMD yang disusun dengan jumlah anggaran Rp.41.316.000, terealisasi sebesar Rp.38.923.200 dan keluarannya 2

Dokumen Rancangan Awal (Teknokratik) diantaranya : RPJMD Tahun 2026-2030, dan Dokumen Rancangan Awal (Teknokratik) RKPD Tahun 2025;

- b. Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan jumlah anggaran Rp.90.849.800, terealisasi sebesar Rp.83.386.577, dan keluarannya 2 Dokumen telaahan Rancangan Awal (Teknokratik), diantaranya Dokumen telaahan Rancangan Awal (Teknokratik) RPJMD Tahun 2026-2030, dan Dokumen Rancangan Awal (Teknokratik) RKPD Tahun 2025;

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Berita Acara Hasil Konsultasi Publik dengan dengan jumlah anggaran Rp.13.996.700, terealisasi sebesar Rp.13.128.600, dan keluarannya 1 Berita acara hasil konsultansi publik diantaranya Berita acara hasil konsultansi publik dokumen Rancangan Awal dan Berita acara hasil konsultansi publik dokumen RKPD Tahun 2024;

- d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran Rp.65.455.000, terealisasi sebesar Rp.61.555.400, dan keluarannya berita acara musrenbang RPJPD dan berita acara musrenbang RKPD Tahun 2025;

- e. Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Usulan musrembang kecamatan yang Terverifikasi dengan jumlah anggaran Rp.48.480.000, terealisasi sebesar Rp.47.751.400, dan keluarannya 440 Usulan hasil musrembang kecamatan yang terverifikasi;

- f. Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan jumlah anggaran Rp.434.347.000, terealisasi sebesar Rp.411.423.952, dan keluarannya 3 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan diantaranya Dokumen RPJPD 2025-2045, Dokumen RKPD Tahun 2025 dan, Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2024.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi yang Telah dianalisis untuk Perencanaan Pembangunan dengan Target kinerja Renstra Tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu:

- a. Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan jumlah anggaran Rp.15.560.500, terealisasi sebesar Rp.14.218.700, dan keluarannya 68 Masukan Analisis

data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Dibina Dalam Pemanfaatan Data dan Informasi dengan Target 1 Orang Per OPD dengan jumlah anggaran Rp.10.822.500, terealisasi sebesar Rp.9.812.800, dan keluarannya 28 Orang (28 OPD);

- c. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan dengan jumlah anggaran Rp.17.631.000, terealisasi sebesar Rp.17.203.000, dan Keluaran Buku profil Pembangunan Daerah Tahun 2023, sub kegiatan tersebut juga merupakan hasil rekomendasi revidi kinerja oleh Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

- 3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan dengan Target kinerja Renstra Tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub. Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota. Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dengan jumlah anggaran Rp.19.897.200, terealisasi sebesar Rp.14.650.800, dan keluarannya 2 Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan

dan Pelaksanaan Pembangunan (Monev RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024);

- b. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dengan jumlah anggaran Rp.211.543.000, terealisasi sebesar Rp.199.393.900, dan Keluarannya Laporan Triwulan hasil valuasi pelaksanaan APBD dan Tugas Pembantuan Tahun 2024.

➤ **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

- 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Kesesuaian Program Prioritas Perangkat Daerah Dengan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia dengan Target kinerja Renstra Tahun 2024 sebesar 90% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Terasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaannya (JP/JM/T) dengan jumlah anggaran Rp.15.285.600, terealisasi sebesar Rp.13.310.200, atau sebesar 87.08%, dengan keluaran 11 Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang difasilitasi penyusunannya;

- b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp.10.244.700, terealisasi sebesar Rp.9.475.200, atau sebesar 92,49%, dengan keluaran 11 Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah jumlah rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah dengan jumlah anggaran Rp.15.686.400, terealisasi sebesar Rp.14.619.500, atau sebesar 93.20% dengan keluaran 1 Rekomendasi hasil pelaksanaan Renja OPD Bidang Pemerintahan;

- d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dengan jumlah anggaran Rp.37.212.800, terealisasi sebesar Rp.35.783.600, atau sebesar 96.16% dengan keluaran 1 Laporan Pendampingan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat,

- laporan tersebut memuat fasilitasi pendampingan penurunan angka kemiskinan ekstrem serta data SDGs;
- e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia yang Terasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaannya (JP/JM/T) dengan jumlah anggaran Rp.33.412.200, terealisasi sebesar Rp.31.615.100, atau sebesar 94,62% dengan keluaran 5 Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pembangunan Manusia yang difasilitasi penyusunannya;
- f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp.8.501.400, terealisasi sebesar Rp.7.904.600, atau sebesar 92,98% dengan keluaran 5 Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;
- g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan jumlah anggaran Rp.134.754.500, terealisasi sebesar Rp.133.692.100,

atau sebesar 99,21% dengan keluaran 1 Rekomendasi hasil pelaksanaan Renja OPD Bidang Sumber Daya Manusia;

- h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia dengan jumlah anggaran Rp.88.594.400, terealisasi sebesar Rp.81.240.400, dengan keluaran 1 Laporan Pendampingan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat, laporan tersebut memuat fasilitasi pendampingan penurunan angka stunting, anak putus sekolah, kesetaraan gender serta Kabupaten Layak Anak (KLA).

- 2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam). Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Kesesuaian Program Prioritas Perangkat Daerah Dengan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan Target kinerja Renstra Tahun 2024 sebesar 90% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Terasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaannya (JP/JM/T) dengan jumlah anggaran

Rp.14.134.100, terealisasi sebesar Rp.13.689.700, dengan keluarannya 3 Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perekonomian yang difasilitasi penyusunannya;

- b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp.6.279.700, terealisasi sebesar Rp.6.187.300, dengan Keluaran 3 Organisasi Perangkat Daerah bidang perekonomian yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan jumlah anggaran Rp.3.350.000, terealisasi sebesar Rp.2.874.600, dengan Keluaran 1 Rekomendasi hasil pelaksanaan Renja OPD Bidang Perekonomian.

- d. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJP, RPJMD dan RKPD).

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam yang Terfasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaannya (JP/JM/T) dengan jumlah anggaran Rp.28.614.300, terealisasi sebesar

Rp.27.916.000, dengan Keluaran 3 Dokumen Perencanaan OPD Bidang Sumber Daya Alam yang difasilitasi penyusunannya;

- e. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp.5.348.300, terealisasi sebesar Rp.2.966.900, dengan Keluaran 3 Organisasi Perangkat Daerah bidang perekonomian yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;

- f. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Sumber Daya Alam.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam dengan jumlah anggaran Rp.7.709.000, terealisasi sebesar Rp.6.870.200, dengan Keluaran 1 Rekomendasi hasil pelaksanaan Renja OPD Bidang Sumber Daya Alam;

- 3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Indikator capaian kegiatan adalah Persentase Kesesuaian Program Prioritas Perangkat Daerah Dengan Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Target kinerja Renstra Tahun 2024 sebesar 90% dan realisasi sebesar

100%. Program tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Terasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaannya (JP/JM/T) dengan jumlah anggaran Rp.50.027.300, terealisasi sebesar Rp.49.848.000, dengan Keluaran 3 Dokumen Perencanaan OPD Bidang Infrastruktur yang difasilitasi penyusunannya;

- b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asisstensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp.3.886.400, terealisasi sebesar Rp.2.259.600, dengan Keluaran 3 Organisasi Perangkat Daerah bidang perekonomian yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;

- c. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan jumlah anggaran Rp.58.596.900, terealisasi sebesar Rp.58.156.000, dengan Keluaran 1

Rekomendasi hasil pelaksanaan Renja OPD Bidang Infrastruktur;

- d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dengan jumlah anggaran Rp.10.784.900, terealisasi sebesar Rp.10.252.400, dengan keluaran 3 Laporan Pendampingan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat, laporan tersebut memuat fasilitasi pendampingan Penyusunan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar dan RDTR (Kawasn KIPT Hangkoang dan KEK Pasi Gusung);

- e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Terfasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaannya (JP/JM/T) dengan jumlah anggaran Rp.19.373.400, terealisasi sebesar Rp.19.000.800, dengan Keluaran 11 Dokumen Perencanaan OPD Bidang Kewilayahan yang difasilitasi penyusunannya;

- f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan

Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistenesi Dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah. dengan jumlah anggaran

Rp.3.457.100, terealisasi sebesar Rp.2.802.800, dengan Keluaran 11 Organisasi Perangkat Daerah bidang kewilayahan yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;

- g. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan jumlah anggaran Rp.3.529.300, terealisasi sebesar Rp.3.078.800, dengan Keluaran 1 Rekomendasi hasil pelaksanaan Renja OPD Bidang Kewilayahan;

- h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD pada Bidang Kewilayahan dengan jumlah anggaran Rp.1.745.700, terealisasi sebesar Rp.1.293.800, dengan keluaran 1 Laporan Pendampingan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat, laporan tersebut memuat fasilitasi pendampingan Pisew (Penyelenggaraan Infrastruktur Ekonomi Wilayah).

➤ **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

- 1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian dan

Peraturan. Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan dengan Target kinerja Renstra Tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub. Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan jumlah anggaran Rp.73.010.000, terealisasi sebesar Rp.72.520.875, atau sebesar 99.33% dengan keluaran 1 Laporan Faslitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah, laporan fasilitasi tersebut memuat diantaranya :

- a) Pengukuran/Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (Amanat RPJMD);
- b) Pengukuran/Survei Indeks Kesalehan Sosial (Amanat RPJDM),
- c) Fasilitasi Pengukuran Indeks Inovasi Daerah
- d) Fasilitasi Pendampingan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
- e) Fasilitasi Pendampingan Pengukuran Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).
- f) Fasilitasi Pengukuran indeks daya saing daerah Tahun 2024;
- g) Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan Umum dengan jumlah anggaran Rp.168.000.000, terealisasi sebesar Rp.167.399.900, atau sebesar 99.64% dengan keluaran 1 Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2024.

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan. Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang Dimanfaatkan dengan Target kinerja Renstra Tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial, Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial dengan jumlah anggaran Rp.57.993.000, terealisasi sebesar Rp.54.975.500, atau sebesar 94.80% dengan keluaran 1 Dokumen Survei Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

3. Kegiatan Pengembangan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Perangkat Daerah Yang Mengembangkan Inovasi dan Tekhnologi Daerah dengan Target kinerja Renstra Tahun 2024 sebesar 50% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub. Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan, Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif, dengan jumlah anggaran Rp.50.997.000, terealisasi sebesar Rp.49.516.400, atau sebesar 97.10% dengan keluarannya 1 Laporan Fasilitasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan, laporan fasilitasi tersebut memuat diantaranya :
- a) Penginputan Indeks Inovasi Daerah;
 - b) Penyusunan Dokumen Realisasi Indikator Kinerja Kunci;
 - c) Penyusunan Dokumen Inovasi untuk Penghargaan Pembangunan Daerah;
 - d) Penyusunan Policy Brief;
 - e) Fasilitasi Kerjasama Budidaya Teripang dan Perlindungan Lamun yg kerja sama dengan Universitas Nasional;
 - f) Survei Produk Unggulan Daerah.

2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Implementasi dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kepulauan Selayar Nomor : 08/I/Tahun 2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian IKU Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2024

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Satu an	Tar get	Real isasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	90	100	111,11
2.	Meningkatkan penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar tahun 2024

Dari tabel diatas, Bappelitbangda memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 2 (dua) sasaran strategis Bappelitbangda Kepulauan Selayar. dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 105.55%.

2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan Urusan Penunjang Pemerintahan dengan 2 Fungsi Utama yani : 1) Fungsi Penunjang Perencanaan dan 2) Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan, Adapun capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2024

N o	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tar get	Realisa si	Capaian Kinerja	Ko de
A.	Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, inovatif, persisten serta berorientasi hasil		Persentase Program Prioritas Pembangunan Nasional yang didukung oleh Program Prioritas Pembangunan Daerah	%	100	100	100	
1.		Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	90	100	111,11	
2.		Meningkatkan penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	
B.	Mewujudkan reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	na	na	na	na	
3.	Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	nilai	BB	BB*	100	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	B	B	100	
			Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	nilai	Ses uai	na	na	

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar tahun 2024
* data capaian tahun 2023

Tabel 2.3 di atas menunjukkan realisasi capaian kinerja bidang urusan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, adapun hasil realisasi 1 kinerja tujuan dan 1 kinerja sasaran pada urusan penunjang, sampai dengan saat ini, belum dapat disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun 2024, disebabkan pelaksanaan penilaian belum dilakukan oleh perangkat daerah pengampu urusan.

2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

1) Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana dokumen

perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, dan dokumen turunannya, saling terintegrasi serta selaras dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi, tujuannya agar 1).efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan dalam pencapaian target pembangunan meningkat, 2).tumpang tindih kebijakan atau program antar perangkat daerah dapat dihindari, sehingga pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran. 3).perencanaan yang berbasis data dan bukti untuk menghasilkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta berjalan lebih efisien, akuntabel, dan berkelanjutan, dihitung dengan membandingkan jumlah program nasional yang diadopsi oleh daerah dengan jumlah total program prioritas nasional. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan bersama. Indikator ini penting untuk memastikan adanya sinergi antara kebijakan dan program yang dirancang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

keterkaitan antara sasaran prioritas Pembangunan nasional dengan program prioritas pembangunan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Matriks Program Prioritas Daerah yang mendukung
Prioritas Nasional Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah Program	Ket
1	1. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif	15 Program	
2	2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2) Pembangunan infrastruktur pendukung program	8 Program	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah Program	Ket
3	3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	strategis dan prioritas pada sub kawasan/sub sentra		
4	4. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	3) Peningkatan investasi sektor unggulan daerah	14 Program	
		4) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam bernilai ekonomi berbasis potensi desa	9 Program	
5	5. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	5) Peningkatan derajat hidup masyarakat yang berkarakter, berbudaya dan bermartabat	19 Program	
6	6. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing			
7	7. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	7 Program	
J U M L A H			72 Program	

Sumber : RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024

Pernyataan pada tabel 2.4 diatas dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 halaman 117 dan tabel 2.6 di bawah (pengukuran capaian sasaran ke – 2).

Indikator Kinerja sasaran (intermediate outcome) satu didukung dengan 2 (dua) Program (indikator outcome), yakni 1) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan 2) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tabel 2.5
Croscutting Sasaran Program

Sasaran	Indikator	Target	Capaian	Program	Indikator	target	Capaian
Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	90	100	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	90	100
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah	90	100

Penjelasan Capaian Indikator Program (Outcome)

➤ **Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah** dengan indikator kinerja Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD, Indikator ini menunjukkan seberapa baik program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah program RPJMD yang tercantum dalam RKPD dan jumlah program RPJMD yang seharusnya ada dalam RKPD. Persentase konsistensi penjabaran program dalam RKPD yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah menerjemahkan RPJMD dengan baik dan konsisten.

1. Kesesuaian Program RPJMD dan RKPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, terdapat 285 (dua ratus delapan puluh lima) program perencanaan Pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 terdapat 236 (dua ratus tiga puluh enam) program pernyataan tersebut dapat dilihat pada pada Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 halaman 54

2. Kesesuaian program RKPD dan APBD.

Dari 236 program yang terdapat pada RKPD Tahun 2024, terdapat 206 program yang dianggarkan pada APBD dan sebanyak 30 program atau sebanyak 10,58% yang tidak dianggarkan pada APBD;

3. Kesesuaian program RPJMD dan APBD.

Dari 285 program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, hanya 206 program yang di anggarkan pada APBD Tahun 2024, terdapat 79 program yang tidak dianggarkan pada APBD.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, didukung dengan kegiatan 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Beberapa upaya dalam rangka menunjang dan memonitoring pencapaian indikator kinerja program ini, diantaranya adalah :

1. Penyusunan dan Penetapan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2029;
2. Pelaksanaan Konsultansi Publik Dokumen RKPD Tahun 2024;
3. Fasilitasi Pelaksanaan Musrembang Kecamatan dan Pelaksanaan Musrembang RKPD Tahun 2024;
4. Verifikasi Usulan kegiatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2024;
5. Rapat Komisi di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD Tahun 2024) pada Bappelitbangda Propinsi Sulawesi-Selatan;
7. Penyusunan dan Penetapan Dokumen RKPD Tahun 2025;
8. Penyusunan dan Penetapan Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2024;

9. Pendampingan pelaksanaan e-planning (proses perencanaan dan penganggaran dan pelaporan) melalui aplikasi terpusat yang disediakan kemendagri yakni SIPD;
10. Penyusunan Buku Profil Pembangunan Tahun 2023;
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala pengendalian pembangunan berbasis web (e-manca).

Selain upaya pencapaian kinerja tersebut diatas, tahun 2024 Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan penyusunan Rancangan Awal (Tekhnokratik) RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.

➤ ***Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah*** dengan indikator kinerja Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan sasaran prioritas pembangunan daerah, indikator ini mengukur sejauh mana program prioritas yang diterapkan oleh perangkat daerah sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan daerah. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah program prioritas perangkat daerah yang sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan daerah dengan jumlah total program prioritas perangkat daerah. Semakin tinggi persentase kesesuaian, maka semakin baik program prioritas perangkat daerah mewujudkan sasaran prioritas pembangunan daerah. Ini penting untuk memastikan bahwa program pembangunan daerah efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Indikator ini juga membantu pemerintah daerah dalam memantau dan mengevaluasi kinerja program prioritas perangkat daerah dan memastikan bahwa program pembangunan daerah selaras dengan sasaran prioritas pembangunan daerah.

Perumusan program prioritas tahun 2024 mengacu pada tema pembangunan RKP Tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan sasaran pembangunan nasional Tahun 2024 diarahkan untuk: (a).pertumbuhan ekonomi, (b).tingkat pengangguran terbuka, (c).rasio gini, (d).Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (e).penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka rencana prioritas pembangunan daerah tahun 2024 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, penjelasan keterkaitan antara sasaran prioritas Pembangunan nasional dengan program prioritas pembangunan daerah seperti tertuang pada dokumen RKPD tahun 2024 halaman 287 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2024

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan derajat hidup masyarakat yang berkarakter, berbudaya dan bermartabat								
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	1	Program pengelolaan pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persen	65,5	100	57.041.804.200	Disdikpora
				Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	Persen	78,74	100		
				Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	88,46	100		
		2	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasilitasi	Persen	47,55	100	260.000.000	Dinsos
		3	Program rehabilitasi sosial	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	6.100.000.000	Dinsos
				Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	98,59	100		
				Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	98,99	100		
				Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100	100		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	47,55	100		
		4	Program penanganan bencana	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	100	620.000.000	Dinsos
		5	Program pengembangan perumahan	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	82,99	100	623.437.596	DPKP
				Persentase Warga Negara yang terkena relokasi	Persen	0	100		

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
				akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni					
		6	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan	Persen	48,33	49,36	565.943.000	Distan KP
		7	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	72,54	80,0	2.638.033.200	DP3AP2KB
		8	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	Angka	31/1000 Penduduk	36/100.000 Penduduk	50.000.000	Dinkes
		9	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (SPM)	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	76,3	100	111.534.676.194	Dinkes
				Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	76,4	100		
				Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	80,04	100		
				Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	54,8	100		
				Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	68,97	100		
				Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100		
				Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	50,9	100		
				Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100		
				Persentase Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100		
						Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persen		
				Persentase Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100		
				Persentase Warga Negara dengan risiko	Persen	85,56	100		

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
				terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan					
				Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Kategori	Utama	Utama		
2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	1	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase jenis komoditi yang dipantau	Persen	20,58	100	421.200.350	Disdag KUKM
		2	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	Persen	18,23	100	10.000.000	Disdag KUKM
3	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	1	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Kebijakan Bidang Ketanahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang Dirumuskan	Persen	100	100	498.776.200	Kesbangpol
		2	Program pengembangan kebudayaan	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Persen	100	100	151.000.000	Disparbud
		3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan	Persen	0	0	820.638.700	Semua Kecamatan
4	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	1	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan	Persen	0,43	1	433.151.200	Semua Kecamatan
		2	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Kebijakan Bidang Ketanahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang Dirumuskan	Persen	100	100	498.776.200	Kesbangpol
5	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program pembinaan perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	9,40	10,50	224.486.000	DPK
		2	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga (medali)	Medali	42,50	60,00	2.489.561.300	Disdikpora

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
		3	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase penurunan masalah kesehatan masyarakat	Persen	37,41	20,00	50.000.000	Dinkes
2	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif								
1	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhdap pelayanan	1	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase layanan sistem informasi terkait program kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persen	43,24	100	1.039.255.100	Diskominfo SP
		2	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	100	100	4.050.000.000	Setda
				Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	97	100		
		3	Program kepegawaian daerah	Persentase Pemenuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persen	23,35	92,60	1.185.907.300	BKPSDM
				Persentase ASN yang berkinerja baik	Persen	96,67	100		
		4	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Menit	25,71	15	396.089.750	Semua Kecamatan
		5	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	96,49	97,00	2.556.229.800	Bappelitbangda
		6	Program penyelenggaraan pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3,002	3+	5.093.465.100	Inspektorat Daerah
		7	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	8,09	5,00	162.550.412.632	BPKPD
		8	Program pendaftaran penduduk	Persentase Penerbitan KTP-el	Persen	90,26	98,00	565.000.000	Disdukcapil
				Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	55,69	57,00		
		9	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum (SPM)	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	420.642.000	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Persen	100	100		
10	Program	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	0,543	0,560	89.860.200	DP3AP2KB		

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
			pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan						
		11	Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara terintegrasi	Persen	26,08	100	3.484.223.500	Diskominfo SP
		12	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah	Persen	100	100	1.353.586.600	Bappelitbangda
		13	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentasi pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	Persen	100	100	903.000.000	Bappelitbangda
		14	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Program Kerja DPRD yang Trintegrasi dengan Program RPJMD dan RKPD	Persen	100	100	13.389.657.700	Setwan
2	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program administrasi pemerintahan desa	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi	Persen	100	100	753.757.400	DisPMD
3	Pembangunan infrastruktur pendukung program strategis dan prioritas pada sub kawasan/ sub sentra								
1	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Persen	58,24	73,19	41.608.473.302	DisPUTR
				Proporsi panjang jalan desa yang terbangun	Persen	0	85,00		
				Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten	Persen	96,00	99,00		
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	2	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir WS Kewenangan Kabupaten	Persen	78,72	92,00	11.664.546.419	DisPUTR
				Persentase Luas Kawasan Permukiman sepanjang Pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	0	45,00		
				Persentase Luas Daerah irigasi kewenagan Kabupaen Kota yang di layani oleh jaringan irigasi	Persen	1,78	1,92		
		3	Program pengelolaan	Persentase Warga Negara yang memperoleh	Persen	58,23	100	12.681.410.025	DisPUTR

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
			dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPM)					
		4	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah (SPM)	Persen	0	100	9.302.966.518	DisPUTR
		5	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persen	0,50	3,42	2.691.172.291	DPKP
		6	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persen	97,37	100	7.156.034.300	Distan KP
3	Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	1	Program pengelolaan pelayaran	Persen	41,37	63,94	1.548.203.364	Dishub
		2	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persen	25,23	30,85	1.740.500.120	Dishub
4	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam bernilai ekonomi berbasis potensi desa							
1	Meningkatnya kapasitas SDM dan Fasilitas Perekomian Perdesaan	1	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persen	0,48	2,00	661.000.000	Disperin TK
		2	Program penempatan tenaga kerja	Persen	39,06	39,69	200.000.000	Disperin TK
		3	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persen	54,62	100	613.187.100	Disdag KUKM
		4	Program penyuluhan pertanian	Persen	26,95	27,72	193.018.300	Distan KP
		5	Program kawasan permukiman	Persen	6,32	4,22	977.134.526	DPKP
		6	Program pemberdayaan dan				1.226.482.600	DP3AP2KB
			dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
		peningkatan keluarga sejahtera (KS)	(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK K R, dan UPPKS)					
			BKB	Persen	14,38	0,74		
			BKR	Persen	5,74	0,61		
			BKL	Persen	6,00	0,62		
			PIK R	Persen	4,30	0,51		
			UPPKS	Persen	5,09	0,91		
2	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persen	33,33	33,33	841.640.755	DisPMD
		2	Program peningkatan kerjasama desa	Persen	0	3,70	200.575.000	DisPMD
		3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	97,73	100	8.980.829.606	Semua Kecamatan
5 Peningkatan investasi sektor unggulan daerah								
1	Meningkatnya usaha perikanan	1	Program promosi penanaman modal	Investor	2,281	2,3	261.688.550	DPMPSTP
		2	Program pengelolaan perikanan tangkap	Ton	21.223,40	25.480,87	2.625.740.350	Disper
		3	Program pengelolaan perikanan budidaya	Ton	528,66	1.139,25	1.349.192.772	Disper
		4	Program perekonomian dan pembangunan	Persen	100	100	1.591.693.800	Setda
		5	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Ton	241,48	261,49	984.382.312	Disper
		6	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persen	0,02	45,00	80.000.000	Disperin TK
2	Meningkatnya usaha pariwisata	1	Program peningkatan daya tarik destinasi	Persen	5,16	6,00	1.865.000.000	Disparbud

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
			pariwisata						
		2	Program pemasaran pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	777,27	800,00	800.000.000	Disparbud
				Persentase peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara yang datang ke kabupaten Kepulauan Selayar	Persen	242,72	350,00		
				Tingkat huniaan akomodasi	Persen	3,97	10,00		
		3	Program pengelolaan penerbangan	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	Persen	0	100	5.125.150	Dishub
		4	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM/tenaga kerja di sektor pariwisata yang mendapatkan pelatihan	Persen	100	100	400.000.000	Disparbud
		5	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	Persen	100	100	55.019.100	Disdag KUKM
6	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	Persen	10,00	18,00	2.840.000.000	Disperin TK		
3	Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	1	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	12,826	67	335.173.400	DPMPTSP
		2	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	19.679.200	DPMPTSP
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana								
1	Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	1	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	Angka	1,76	1,59	970.898.500	DLH
		2	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persen	1,40	1,58	942.569.900	DLH

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
		3	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / atau Kegiatan	Persen	60,00	66,00	119.132.400	DLH
		4	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase Sarana Prasarana Persampahan	Persen	0	100	51.251.500	Dis PUTR
2	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	5	Program penanggulangan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	1.097.993.000	BPBD
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100		
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	87,30	100		
		6	Program pengelolaan persampahan	Presentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	Persen	0,71	1,3	1.464.629.000	DLH
3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	7	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Persen	92,68	100	232.338.000	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
				Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran	Menit	7,58	6,00		

Sumber : Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 42 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Tabel 2.6 diatas menunjukkan keselarasan terkait 72 (tujuh puluh dua) program prioritas pembangunan daerah dengan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah. sedangkan keterkaitan antara sasaran prioritas Pembangunan nasional dengan program prioritas pembangunan daerah diuraikan pada tabel 2.4 diatas. Pernyataan pada tabel 2.4 dan tabel 2.6 diatas dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 halaman 117:

Harmonisasi dan Sinkronisasi pencapaian tersebut di atas dicapai melalui fasilitasi pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pada masing-masing bidang perencanaan Pembangunan diantaranya :

- a. Bidang Pemerintahan yakni : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem, koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data P3KE serta pemantuan capaian pelaksanaan SDGs;
- b. Bidang Pembangunan manusia diantaranya fasilitasi pendampingan penurunan angka stunting (rembuk stunting, manajemen data stunting, reuiu program kegiatan penurunan angka stunting), pengembangan regulasi anak putus sekolah (pengembangan rencana aksi daerah dan memastikan anggaran berbasis sektor), kesetaraan gender dan Kabupaten Layak Anak (KLA);
- c. Bidang perekonomian diantaranya fasilitasi pendampingan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Propinsi Sulawesi Selatan;
- d. Bidang Sumber Daya Alam diantaranya fasilitasi pendampingan Pamsimas (penyediaan air minum berbasis masyarakat), Sanimas (sanitasi berbasis masyarakat), RPSDA-WS (rencana pembangunan strategis sumber daya air wilayah Jeneberang) dan Penyusunan KLHS RPJPD Selayar 2025-2045;

- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan diantaranya fasilitasi pendampingan Penyusunan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar dan RDTR (Kawasan KIPT Hangkoang dan KEK Pasi Gusung) dan pendampingan Pisew (Penyelenggaraan Infrastruktur Ekonomi Wilayah).

2) Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan Jumlah hasil penelitian atau kajian yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Indikator ini diwujudkan dengan meningkatkan inisiasi hasil penelitian dan pengkajian yang aplikatif sebagai materi naskah akademik atau dalam bentuk pengambilan kebijakan (Policy Brief) bagi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia, serta, infrastruktur dan kewilayahan.

Arah kebijakan dan pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, didukung dengan kegiatan yakni : 1) Penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian dan Peraturan, 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, 3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan 4) Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Terdapat 5 (lima) hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan daerah / naskah akademik pada kegiatan penyusunan rancangan awal RPJPD 2025-2045, rancangan awal RKPD Tahun 2025 dan perubahan RKPD 2024, yaitu :

1. Pengukuran/Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 (Amanat RPJMD);

2. Pengukuran/Survei Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2023 (Amanat RPJDM),
3. Fasilitasi Pengukuran Indeks Inovasi Daerah
4. Fasilitasi Pendampingan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
5. Fasilitasi Pendampingan Pengukuran Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).

Tahun 2024, Bappelitbangda Kepulauan Selayar melaksanakan beberapa kegiatan kelitbang, beberapa diantaranya akan dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah pada penyusunan naskah akademik / Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026 (RKPD 2026 dan Rancangan RPJMD 2025-2029), adapun kegiatan dan fasilitasi penelitian, pengkajian dan pengembangan tahun 2024 diantaranya :

1. Pengukuran/Survei Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2024 (Amanat RPJDM)
2. Fasilitasi Pengukuran indeks daya saing daerah Tahun 2024;
3. Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Penginputan Indeks Inovasi Daerah;
5. Penyusunan Dokumen Realisasi Indikator Kinerja Kunci;
6. Penyusunan Dokumen Inovasi untuk Penghargaan Pembangunan Daerah;
7. Penyusunan Policy Brief;
8. Fasilitasi Kerjasama Budidaya Teripang dan Perlindungan Lamun yg kerja sama dengan Universitas Nasional;
9. Survei Produk Unggulan Daerah.

3) Nilai Sakip

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan penilaian Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pengukurannya dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten,

Indikator ini diwujudkan dengan meningkatkan kapabilitas kelembagaan perencanaan, koordinasi dan kompetensi sdm perencanaan.

Sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja sasaran dengan indikator kinerja Nilai Sakip belum dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024, disebabkan pelaksanaan evaluasi SAKIP Tahun 2024 belum dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu urusan/kewenangan. Adapun target yang ingin dicapai oleh Bappelitbangda Kepulauan Selayar tahun 2024 mendapat nilai B (60).

Namun demikian, dapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian SAKIP Bappelitbangda Nomor : 022/EV-LAKIP/II/2024/ITDA tanggal 26 Februari 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, bahwasanya Bappelitbangda memperoleh nilai sebesar 70,10 dengan kategori BB (Sangat Baik), dengan demikian Bappelitbangda akan terus bekerja lebih giat agar dapat terus meningkatkan nilai Sakip yang diperoleh.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, didukung dengan kegiatan yakni : 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dan 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

4) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan nilai temuan material pada laporan pemeriksaan regular oleh Inspektorat Kabupaten, Indikator ini diwujudkan dengan menerapkan pengelolaan sistem keuangan yang berbasis akrual sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan data laporan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Bappeda Litbang) Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan adalah baik. Nilai rata-rata keseluruhan unsur layanan adalah 82,11 dalam skala 100. Namun, terdapat beberapa unsur layanan yang perlu diperbaiki, yaitu waktu pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan pengguna layanan.

Beberapa rekomendasi terhadap perbaikan diantaranya penerapan system pelayanan secara online, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana secara berkala, serta penerapan system pengaduan secara online.

Untuk itu Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar berkomitmen meningkatkan pelayanan dengan menerapkan system berbasis online.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, didukung dengan kegiatan yakni : 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 2) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, 3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

5) Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Indikator kinerja ini mencakup beberapa elemen utama yang bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun secara transparan, akurat, transparans, akuntabel, dan patuh terhadap regulasi yang ada serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja sasaran dengan indikator kinerja Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan belum dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024, dikarenakan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah tahun 2024 baru disusun pada awal tahun 2025 serta pelaksanaan penilaian atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dilakukan pada awal tahun 2025.

Tabel. 2.7 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
1	Urusan Perencanaan								
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.530.427.100	1.446.285.929	84.141.171	94,50	2	100%	6	100%
2	Urusan Penelitian dan Pengembangan								
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	350.000.000	661.481.871	3.744.129	98,40	1	100%	4	100%
3	Urusan Penunjang								
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.387.750.900	4.252.274.955	135.475.945	96,91	3	100%	8	100%

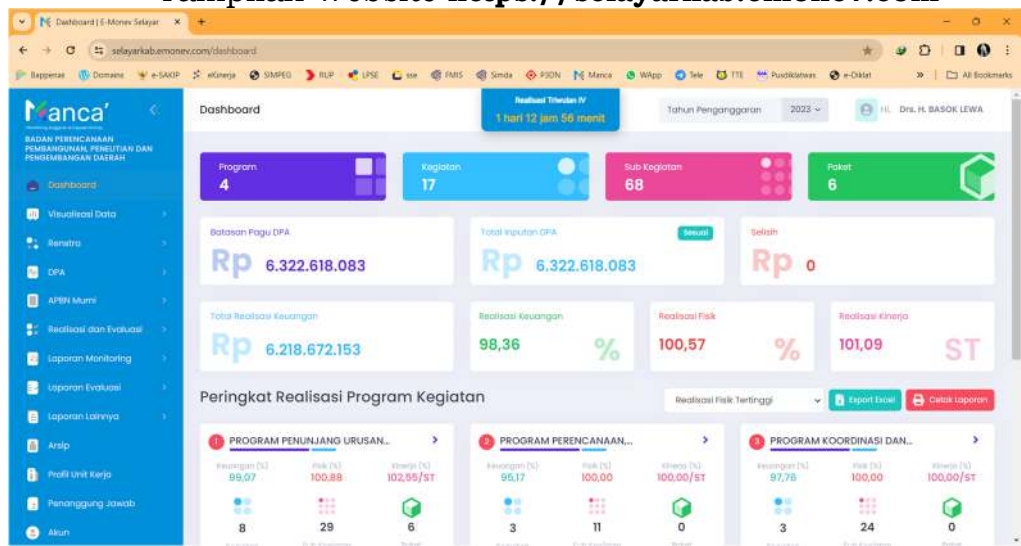
Sumber : RFK Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2024

2.1.5. Inovasi

Perkembangan sistem informasi dan teknologi menuntut Pemerintah agar dapat memberikan pelayanan publik secara cepat, tepat, mudah di akses dan berbiaya murah, untuk itu pada tahun 2023 Bappelitbangda Kepulauan Selayar membuat inovasi sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Terpadu, yang berisi database program kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi kinerja dan keuangan per tahun anggaran perencanaan, data tersebut direkap dalam bentuk website sehingga dapat dengan mudah di akses oleh para pengambil kebijakan.

Tujuannya adalah meyediakan data capaian realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi anggaran yang dapat akses secara internal di lingkungan OPD terkait.

Gambar 2.1
Tampilan Website <https://selayarkab.emonev.com>



Manfaat integrasi dari aplikasi monitoring dan evaluasi antara lain : 1) organisasi dapat meningkatkan efektivitas, mengurangi risiko, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam pencapaian kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan, 2) Memberikan informasi yang diperlukan bagi pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan strategis, 3) Memberikan informasi dasar untuk evaluasi berkelanjutan dan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan penganggaran.

2.1.6. Prestasi / Penghargaan

Pada tahun 2024, Bappelitbangda Kepulauan Selayar meraih Juara Harapan 1 Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan kegiatan pengendalian perencanaan pembangunan daerah oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui evaluasi kreatif dan komprehensif terhadap pembangunan daerah untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota setiap tahun. Pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil dengan baik dalam perencanaan, pencapaian pelaksanaan, dan inovasi Pembangunan, penghargaan tersebut diberikan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025", bertempat di Sandeq Ballroom Claro Hotel Makassar, Selasa (30/4/2024).

Pada tahun yang sama, Bappelitbangda Kepulauan Selayar juga meraih Penghargaan dengan predikat kinerja terbaik peringkat 1 (satu) pada acara Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi kinerja pemerintah daerah atau individu yang berhasil menunjukkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan.

2.2. KEBIJAKAN DAERAH

Sesuai dengan kewenangannya, Bappelitbangda telah menyusun 2 (dua) dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan menjadi peraturan yakni :

Tabel 2.8
Kebijakan Daerah yang ditetapkan tahun 2024

N O	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan / Masalah yang diselesaikan	Ket
		Nomor, Tanggal Pengesahan	Tentang		
	Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025	Nomor 28 Tahun 2024, Tanggal 5 Juli 2024	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan	Perbup
	Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024	Nomor 42 Tahun 2024, Tanggal 26 Juli 2024	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Bupati Kepulauan Selayar	Perbup

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2024

2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati
Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD (Program/Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	N I H I L		

BAB III
CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Tugas pembantuan dan penugasan yang dilaksanakan

No	Perangkat Daerah	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (Rp)
	NIHIL				

3.2. Hambatan – Hambatan

Bappelitbangda Kepulauan Selayar pada tahun 2024 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam bentuk tugas pembantuan.

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban mengacu pada ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dari hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini diharapkan adanya Hasil Evaluasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi yang nantinya akan dicermati, diperhatikan, dikoordinasikan dan ditindaklanjuti guna terwujudnya peningkatan kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang sehingga visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar 2021 – 2026 dapat tercapai.

Menyadari sepenuhnya, Laporan ini tak luput dari kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, urusan penunjang pemerintahan selama Tahun Anggaran 2024. Segenap keberhasilan, prestasi maupun keterlambatan dan ketidak-sempurnaan dalam pengelolaan selama tahun 2024 telah disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati perkenankanlah kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, semoga Allah SWT akan selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dan semoga selalu meridhoi setiap usaha dalam mengemban tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas.

Benteng, 23 Januari 2024
KEPALA BAPPELITBANGDA

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19840104 200903 2 003